

**KOMPENSASI ASURANSI KENDARAAN YANG HILANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Hukum (S.H)

Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Raden Intan Lampung

Oleh

Luthfi Mushthofa

NPM: 1621030512

Jurusan : Muamalah



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2019M**

**KOMPENSASI ASURANSI KENDARAAN YANG HILANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Pada PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Hukum (S.H)

Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Raden Intan Lampung

Oleh

Luthfi Mushthofa

NPM: 1621030512

Jurusan : Muamalah

Pembimbing I : Dr._H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H.

Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2019M**

ABSTRAK

Seiring semakin meningkatnya aktivitas produksi kendaraan bermotor di Indonesia dalam setiap tahunnya, maka hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan akan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat. Hampir setiap rumah tangga memiliki paling tidak satu atau lebih kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Untuk mengurangi risiko yang mungkin akan terjadi, maka diperlukan suatu pengalihan risiko kepada pihak lain melalui asuransi. Bahwa secara umum asuransi adalah menyerahkan pertanggungan risiko kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi untuk jangka waktu dan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Dalam penelitian ini, pada pembiayaan dalam asuransi kendaraan bermotor PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. mengasuransikan jenis pembiayaannya dalam asuransi kerugian.

Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana pelaksanaan kompensasi kendaraan yang hilang pada asuransi PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. dengan nasabah? 2) Bagaimana pelaksanaan hukum Islam tentang kompensasi PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. kendaraan yang hilang? Tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui sistem pelaksanaan kompensasi asuransi kendaraan yang hilang pada asuransi PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Bandar Lampung, 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang kompensasi asuransi kendaraan yang hilang yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan jenis penelitian dalam penulisan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumenstasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini kiranya dapat dikemukakan bahwa hak nasabah akan diberikan kepada nasabah ketika nasabah mengajukan klaim dapat memenuhi syarat-syarat dan dokumen klaim yang sudah diatur dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). Syarat dan dokumen yang maksud adalah *copy* BPKB, *copy* SIM, *copy* STNK, laporan pengaduan kehilangan dari pihak kepolisian, surat keterangan kepolisian daerah (Kapolda), berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian, surat keterangan pemblokiran STNK yang dikeluarkan dari pihak kepolisian dan *copy* KTP pemilik atau orang yang ada dalam kejadian risiko. Ketika nasabah tidak dapat memenuhi salah satu syarat dan dokumen pengajuan klaim dengan alasan yang tepat, kemudian klaim tersebut ditolak oleh pihak PT. Asuransi Bina Dana Arta maka nasabah dapat mengajukan masalahnya pada Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk mendapatkan hak atas klaim asuransi yang seharusnya didapat oleh nasabah. Kompensasi kendaraan yang hilang dalam hal ini dilihat dari sudut pandang hukum Islam, maka kompensasi tersebut harus diberikan kepada nasabah dengan mana akad yang digunakan dalam asuransi adalah akad *tabarru* dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Apabila nasabah sudah memenuhi kewajibannya dalam membayar premi kepada pihak penanggung jika suatu saat nasabah mengalami suatu risiko kerugian dengan pertimbangan berdasarkan akad yang mempunyai tujuan untuk tolong-menolong.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Letnan. H. Endro Suradimin, Sukarame 1, Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Luthfi Mushthofa
NPM : 1621030512
Program Studi : Mu'amalah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **KOMPENSASI ASURANSI KENDARAAN YANG
HILANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Pada PT. Asuransi Bina Dana Arta
Tbk. Cabang Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag. M. Ag.
NIP. 197111061998032005

Ketua Jurusan

Khoiruddin.M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letnan. H. Endro Suratmin, Sukarame 1, Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KOMPENSASI ASURANSI KENDARAAN YANG HILANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Pada PT. Asuransi Bina
Dana Arta Tbk. Cabang Bandar Lampung). Disusun oleh : **Luthfi Mushthofa**
NPM : **1621030512**, Jurusan : **Muamalah**. Telah diujikan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada
Hari/Tanggal : **Jum'at, 10 Juli 2020**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.** (.....)

Sekretaris : **Juhrotul Khulwah, M.S.I.** (.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Linda Firdawanty, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.** (.....)

Penguji III : **Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag.** (.....)



Rekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Khairuddin Tahmid., M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah : 286)



PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tiada terhingga kepada-Mu ya Allah yang mana skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Luqmansyah dan Ibunda Mushlihah, terimakasih untuk setiap lantunan doa-doanya, dukungannya, serta kasih sayang yang tiada pernah putus disetiap langkah, yang selalu memberikan makna dalam setiap kehidupan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, kesehatan dan kasih sayang-Nya kepada Ayah dan Ibu.
2. Kakakku tersayang Puteri Juliana Azalia, adekku tersayang Sabila Lutfiah Ramadhani, saudara, sepupu, dan orang-orang terdekat yang selalu menyayangi dan mendukungku dalam hal apapun.
3. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu sama-sama berjuang, mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah angkatan 2016 khususnya kelas i, terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan secara langsung maupun tidak langsung.
5. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu, UIN Raden Intan Lampung.
Semoga semakin jaya, maju dan berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Luthfi Mushthofa, dilahirkan di Desa Pauh Tanjung Iman, Kalianda, Lampung Selatan pada tanggal 13 Februari 1999, anak kedua dari pasangan Bapak Luqmansyah dan Ibu Mushlihah.

Pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak (TK) Pembina Kalianda Lampung Selatan dan selesai pada tahun 2004. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pauh Tanjung Iman Kalianda Lampung Selatan selesai pada tahun 2010. Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Khairiyah Waylahu Kalianda Lampung Selatan selesai tahun 2013. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kalianda Lampung Selatan selesai tahun 2016.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Muamalah di UIN Raden Intan Lampung melalui jalur UM (Ujian Mandiri) pada tahun 2016.

Bandar Lampung,
Penulis

Luthfi Mushthofa
NPM. 1621030512

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufiq dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai pada akhir zaman.

Penulis skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih melalui tulisan ini kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa mengayomi mahasiswanya.
3. Khairuddin.M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu mendukung mahasiswanya dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.

4. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan I sekaligus dosen pembimbing I yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag. Selaku dosen Pembimbing II yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membagi ilmu, membantu serta memberikan masukan-masukan yang insya Allah dapat menjadi pedoman dan bekal untuk penulis.
7. Yayan Maulana selaku Menejer Umum PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Yang telah sedikit banyak telah membantu dalam mendapatkan informasi serta data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yang penulis lakukan.
8. Ayahanda Luqmansyah dan Ibunda Mushlihah, terimakasih untuk setiap lantunan doa-doanya, dukungannya, serta kasih sayang yang tiada pernah putus disetiap langkah, yang selalu memberikan makna dalam setiap kehidupan, semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada Ayah dan Ibu.
9. Kakakku Puteri Juliana Azalia, adekku Sabila Lutfiah Ramadhani, saudara, sepupu, dan orang-orang terdekat yang selalu menyayangi dan mendukungku dalam hal apapun.

10. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu sama-sama berjuang, mendukung dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah angkatan 2016 khususnya kelas i, terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan secara langsung maupun tidak langsung.
12. UPT perpustakaan baik pusat maupun fakultas, terima kasih atas segala pelayanan, peminjaman buku dan penyediaan tempat yang diberikan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan-kebaikan serta melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amiin.



Bandar Lampung,
Penulis

Luthfi Mushthofa
NPM. 1621030512

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengesahan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikansi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Asuransi Menurut Hukum Islam	14
a. Pengertian Asuransi Syariah.....	14
b. Dasar Hukum Asuransi Syariah	15
c. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah.....	19
d. Jenis-Jenis Asuransi Syariah	21
e. Risiko Asuransi Syariah	24
f. Akad Asuransi Syariah	24

2. Kompensasi Asuransi	26
a. Asas-Asas Dalam Asuransi	26
b. Asuransi Kendaraan Bermotor	32
c. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	32
d. Obyek Asuransi Kendaraan Bermotor.....	33
e. Kerugian dan Ganti Kerugian	34
B. Tinjauan Pustaka	37
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum PT. Asuransi Bina Dana Arta	42
B. Kontrak Asuransi Antara PT. Asuransi Bina Dana Arta Dengan Nasabah.....	48
C. Mekanisme Kerja PT. Asuransi Bina Dana Arta	51
D. Praktik Pelaksanaan Kompensasi Kendaraan yang hilang PT. Asuransi Bina Dana Arta.....	55
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Pelaksanaan Kompensasi Kendaraan Yang Hilang Pada PT. Asuransi Bina Dana Arta	63
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Kompensasi Asuransi Kendaraan Yang Hilang Pada PT. Asuransi Bina Dana Arta	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, adapun judul skripsi ini adalah: **“Kompensasi Asuransi Kendaraan Yang Hilang Dalam Perspektif Hukum Islam”**, istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan.¹
2. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.²

¹ Pengertian Kompensasi”, (On-line), tersedia di:
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kompensasi_\(finansial\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kompensasi_(finansial)) (6 September 2019) .

² Zauddin Ali, *Hukum Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 37.

3. Hukum Islam adalah peraturan yang dibuat oleh Allah SAW untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam baik didunia maupun diakhirat.³

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dapat ditegaskan bahwa skripsi ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang kompensasi asuransi kendaraan yang hilang di PT. Asuransi Bina Dana Arta Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang terjadi alasan penulis dalam memilih dan menetapkan judul tersebut untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Secara Objektif, penelitian ini cukup menarik untuk diteliti, karena yang melakukan penelitian tentang kompensasi asuransi aendaraan yang hilang masih cukup jarang. perkembangan industri asuransi baik syariah maupun konvensional mengalami perkembangan yang cukup baik dan persaingan yang sangat ketat, sehingga segala sesuatu yang diterima dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan objek yang dikecualikan dari pajak pendapatan, perlu memahami suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

peristiwa yang tak tentu, lebih spesifikasinya tentang kompensasi asuransi kendaraan yang hilang.

2. Alasan Subjektif

Secara subjektif, karena sesuai bidang keilmuan pada prodi Muamalah Fakultas Uin Raden Intan Lampung. Tersedianya data atau informasi terkait judul yang diteliti, baik informasi langsung dari perusahaan maupun dari perpustakaan serta media lainnya yang mudah didapatkan.

C. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dan era perdagangan bebas sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia. Persaingan dalam menguasai pangsa pasar di Indonesia tidak hanya melibatkan perusahaan asuransi local akan tetapi juga perusahaan asuransi asing yang beroperasi di Indonesia.

Manusia pada kenyataannya tidak hanya memerlukan pemenuhan kebutuhan fisikologis saja, melainkan juga membutuhkan rasa aman terutama dalam keadaan stabilitas politik dan perekonomian di Indonesia yang tidak stabil dimana resiko selalu mengikuti dalam kehidupan sehari-hari manusia.

Seperti yang tertera dalam firman Allah QS. Al-Maidah (2):

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.(QS. Al-Maidah 2).⁴

Ayat ini memuat perintah tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial. Dana sosial ini berbentuk rekening dana sosial pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah.

Salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan akan rasa aman tersebut adalah ikut serta dalam asuransi. Namun pada umumnya masyarakat Indonesia belum melakukan asuransi sebagai prioritas untuk pemenuhan dalam kebutuhan rasa aman, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel. jadi kendaraan bermotor adalah kendaraan diatas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, *truck*, *trailer*, *pick up*, kendaraan beroda empat dan sebagainya.⁵ Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukan pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh lebih menonjol dan mendominasi dibandingkan dengan kendaraan bermotor niaga ataupun kendaraan umum lainnya. Ini menunjukan bahwa kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor bukan hanya sebagai kebutuhan sarana

⁴ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004). h. 105..

⁵ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta Rajawali Pers, 2012), h. 89.

angkutan saja, namun telah berkembang menjadi kebutuhan pribadi seseorang untuk tujuan pretise maupun sebagai media seseorang guna mengekspresikan status sosialnya. Sehingga tak pelak bagi kendaraan bermotor nyaris telah mensejajarkan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan pokok hidup manusia lainnya.

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Risiko adalah ketidak tentuan yang mungkin melahirkan kerugian, unsur ketidak tentuan ini bisa mendatangkankan kerugian dalam asuransi.⁶ Risiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Risiko yang mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermotor akibat berbagai sebab.

Berhubungan risiko itu hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-teknik tertentu agar dampak yang ditimbulkannya tidak berpengaruh terhadap tujuan atau kegiatan manusia. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mengatasi risiko itu dikenal dengan nama Manajemen Risiko (*Risk Management*).

Suatu hal yang paling penting patut disadari, bahwa dibalik risiko-risiko itu terdapat mekanisme yang canggih, yang jika digunakan sebagaimana mestinya dapat sangat meringankan kesulitan keuangan yang timbulkannya.

⁶Ibid, h. 4.

Mekanisme dimaksud antara lain adalah Asuransi, yang dipandang sebagai mekanisme yang benar-benar sangat penting peranannya dalam kehidupan modern ini. Jadi asuransi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tentu.⁷

Pasal 246 kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.⁸ Definisi asuransi menurut Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1 Pasal 1: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”⁹

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan:

⁷ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), h. 1.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016). h. 1.

⁹ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004). h. 61.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS.An-Nisa: 29).

Risiko kecelakaan yang mungkin menimpa kendaraan bermotor berasal dari luar maupun dari dalam, berasal dari luar dicuri, ditabrak oleh kendaraan lain, dirusak atau dibakar oleh orang, karena banjir, topan badai, dan sebagainya. Bersumber dari dalam karena kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan pengemudi, misalnya menabrak kendaraan lain, menabrak orang, menabrak rumah penduduk, jatuh ke jurang, terbakar, dan sebagainya.

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan erat satu sama lain. Dalam asuransi, risiko selalu digunakan dalam arti pesimis. Oleh karena itu sangat tepat ungkapan yang mengatakan bahwa *risk is traditionally referred to as the raw materid of insurance*. tidak mungkin, apabila berbicara mengenai asuransi tanpa berbicara mengenai risiko, karena risiko merupakan pengertian inti dari asuransi.¹⁰

PT. Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian dengan jenis pertanggungan

¹⁰ Kuat Ismanto, *Asuransi Perpektif Maqasid Asy-Syar'iah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 38.

kendaraan bermotor, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Akan tetapi dari pihak asuransi tidak memenuhi kewajibannya kepada tertanggung. pihak asuransi tidak mengeluarkan kompensasi dari kendaraan yang hilang dengan alasan pengemudi mobil tersebut tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM). Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang kompensasi asuransi kendaraan yang hilang antara nasabah dengan perusahaan apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah pelaksanaan kompensasi kendaraan yang hilang, yang dilakukan di PT. Asuransi Bina Dana Arta Bandar Lampung. Sub-fokus penelitian yang dihadapi ialah pelaksanaan kompensasi kendaraan yang tidak diberikan kepada pihak nasabah asuransi yang mengalami suatu kerugian kendaraan yang hilang.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk lebih akurat dan sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kompensasi Kendaraan Yang Hilang Pada PT. Asuransi Bina Dana Arta dengan nasabah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang kompensasi Yang Diberikan PT. Asuransi Bina Dana Arta Pada Kendaraan Yang Hilang ?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan kompensasi asuransi kendaraan yang hilang pada PT. Asuransi Bina Dana Arta Bandar Lampung.
 - b. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang kompensasi yang diberikan PT. Asuransi Bina Dana Arta pada kendaraan yang hilang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

G. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai kompensasi asuransi kendaraan yang hilang dan juga dapat menambah pengetahuan atau keilmuan serta pemikiran ke-Islaman. Selain itu diharapkan menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi dalam mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan tema

penelitian tersebut. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Agar sistematis dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹¹ Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan pokok permasalahan yang ada dan menggambarkan secara terbuka sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

¹¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 12.

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan pelaksanaan kompensasi kendaraan yang hilang ini dalam ketentuan syariat Islam, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (*observasi*) terhadap gejala yang ada di lokasi kasus penelitian, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini melalui kuesioner atau pertanyaan yang sudah disiapkan. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari perusahaan dan 3 orang karyawan, bahwa berdasarkan informasi dari pihak perusahaan telah terjadi 8 kasus klaim ditolak oleh PT. Asuransi Bina Dana Arta, penelitian ini lakukan terhadap kasus nasabah yang tidak mendapatkan kompensasi asuransi pada tahun 2019.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi perpustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

b. Interview

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab (*interview*) secara langsung kepada objek penelitian yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, agenda dan lain sebagainya.

4. Pengolahan Data

Data terhimpun atau terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Mengoreksi apakah data yang terkumpul atau terhimpun sudah lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian¹². Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen,

¹² Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.182.

observasi, *interview* apakah semua sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.

b. Sistematisasi Data

Menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini adalah data dikelompokkan secara sistematis, yaitu yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh selanjutnya dapat dianalisis. Sedangkan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang kompensasi asuransi kendaraan yang hilang di PT. Asuransi Bina Dana Arta Bandar Lampung. Maka analisis yang digunakan adalah analisis komparatif, setelah analisis data selesai maka hasil yang akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif yang disusun secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan menggunakan berfikir induktif, yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam PT. Asuransi Bina Dana Arta.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Asuransi Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi adalah suatu pengendalian risiko dimana satu pihak mengalihkan risiko yang mungkin dapat terjadi di waktu yang akan datang, kepada pihak lainnya dalam hal ini perusahaan asuransi. Istilah dari kata asuransi berasal dari bahasa inggris yaitu *insurance* yang artinya pertanggungan. Asuransi Syariah adalah *Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamur* berdasarkan pada Fatwa DSN No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha yang saling melindungi dan tolong menolong di mana sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru* yang bertujuan memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perjanjian (perikatan) yang sesuai dengan ketentuan syariah.¹ Dalam hal ini peserta akan memberikan kontribusi atau premi yang mereka bayarkan untuk digunakan dalam pembayaran klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta lainnya. Dalam perusahaan asuransi syariah, dana tetap merupakan milik dari nasabah asuransi,

¹ Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001

perusahaan asuransi hanya sebagai wali amanah atas dana yang dititipkan tersebut.²

b. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dijelaskan bahwa ada dua pendapat utama dari para ulama Islam tentang asuransi, yaitu ada pandangan yang membolehkan dan pandangan yang mengharamkan.³

- 1). Pandangan yang mengharamkan, Para ulama dan pemikir Islam yang menganut pendapat yang mengharamkan asuransi di antaranya adalah Muhammad Amin Bin Umar, atau yang sering dikenal dengan nama Syekh Ibnu Abidin, salah satu seorang fuqaha Islam dari mazhab Hanafi. Adapun buku nya yang terkenal, Hasyibah Ibnu Abidin, ia menyatakan bahwa tidak diizinkan bagi para pedagang untuk mengambil atau menerima uang pengganti dari barang-barang dagangannya yang telah musnah karena praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim ataupun wajib. Sementara ulama lain yang memiliki pandangan yang lebih keras akan keharaman asuransi adalah Syekh Muhammad Al Ghazali. Beliau mengatakan bahwa konsep asuransi haram karena beberapa alasan, diantaranya adalah:

- a). Pada akhir masa pada pembiayaan asuransi dana premi akan dikembalikan beserta dengan bunganya. Praktik ini merupakan

² M. Nur Rianto Al Arief, *Pemasaran Strategi Pada Asuransi Syariah*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 7.

³ Nurul Huda, Muhammad Henykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta Prenada Media Group: 2010), h. 159-161.

riba dan diharamkan. Padahal yang namanya riba telah diharamkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Baqarah: 278)⁴

- b). Adanya penggantian atas kerugian terhadap pihak yang terjamin tidak dapat diterima sesuai dengan syariat islam, karena perjanjian asuransi bukanlah kerja sama dimana terdapat suatu keuntungan dan kerugian.
- c). Para ulama menyimpulkan bahwa para nasabah asuransi atau para pemegang polis, bila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya maka akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi dari jumlah aslinya. Inilah yang dikatakan sebagai suatu pemerasan dan Al-Qur'an telah mengharamkan pemerasan atau pengembalian uang dengan cara yang tidak benar, sebagaimana surat An-Nisa 4 ayat 29 :

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS Al-Baqarah: 278).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

.Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa’: 29)⁵

- d). Ada sebagian kecil dari nasabah yang mengikuti asuransi akan merasakan manfaat dari asuransi tersebut. Karena praktik ini sangat mirip dengan praktik perjudian. menurut sebagian ulama bahwa pada praktiknya asuransi itu tidak lain merupakan judi, maka mereka berpendapat mengharamkannya. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an untuk mengharamkan perjudian, sebagaimana surat Al-Baqarah 2 ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
 لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
 قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

.Artinya: ” mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (QS An-Nisa’: 29).

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. Al-Baqarah: 219)⁶

2). Pandangan para ulama yang membolehkan. Para ulama dan pemikir

Islam yang menganut pandangan membolehkan asuransi syariah: antara lain dikemukakan oleh Ibnu Abidin, Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa (guru besar Universitas Syiria), Syaikh Abdurrahman Isa (guru besar Universitas Al-Azhar Mesir), Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa (guru besar Universitas Kairo), Syaikh Abdul Khalaf, dan Prof. Dr. Muhammad Al-Bahi. Pada dasarnya mereka mengakui bahwa asuransi merupakan suatu bentuk muamalat yang baru dalam Islam dan memiliki manfaat serta nilai positif bagi ummat selama di landasi oleh praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Argumentasi yang mereka pakai dalam membolehkan asuransi menurut Faturrahman Djamil adalah sebagai berikut:

- a). Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
- b). Asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
- c). Asuransi mengandung kepentingan umum karena premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan.
- d). Asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.
- e). Asuransi termasuk usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS Al-Baqarah: 219)

Dalam pandangan yang membolehkan tentang asuransi Islam, diantaranya adalah:

a). Al-Qur'an

(1) Surat At-Taghabun 64 Ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. At-Taghabun:11)⁷

(2) Surat Al-Baqarah 2 Ayat 261

مَثَلُ سَيْلِنَ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ الْأَذْيِ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سُنْبُلَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 261)⁸

c. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip asuransi syariah yaitu antara lain sebagai berikut:⁹

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS At-Taghabun: 11)

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS Al- Baqarah: 261)

⁹ *Ibid.* h. 18-19

- 1). Prinsip ikhtiar dan berserah diri; Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (*ikhtiar*) sesuai dengan kesanggupannya tetapi pada saat yang bersamaan manusia juga harus berserah diri (*tawakal*) hanya kepada Allah SWT. Seringkali konsep yang salah adalah seseorang yang langsung berserah diri tanpa pernah berupaya untuk mengusahakan sesuatu. *Tawakal* hanya boleh dilakukan setelah kita melakukan *ikhtiar*.
- 2). Prinsip tolong menolong (ta'awun); Bahwa setiap peserta asuransi ketika melangsungkan akad harus memiliki niat untuk tolong menolong di antara sesama peserta yang lain. Saling menolong atau tepatnya saling tanggung dalam konteks ini sangat dianjurkan dalam islam.
- 3). Prinsip bertanggung jawab; Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain, dan harus melaksanakan kewajiban di balik menerima yang menjadi hak-haknya.
- 4). Prinsip saling membantu dan bekerja sama; Salah satu keutamaan umat Islam untuk membantu sesamanya dalam berbuat kebajikan, antara lain tersimbolkan dalam konsep kehidupan berjamaah dan berukhuwah dalam konteksnya sangat luas.
- 5). Prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan; Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari musibah, bencana, dan sebagainya terutama melalui penghimpunan

dana tabarru melalui perusahaan yang diberi kepercayaan untuk itu.

Asas saling melindungi ini dijunjung tinggi dalam agama Islam.

d. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

Jenis-jenis asuransi syariah yaitu antara lain sebagai berikut:¹⁰

1). Asuransi Ditinjau dari Fungsinya

- a). Asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b). Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan.
- c). Reasuransi adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang diasuransikan atau sering disebut asuransi dari asuransi.

2). Asuransi Ditinjau dari Polis Dasar

- a). Asuransi Berjangka yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk periode tertentu sesuai dengan kesepakatan misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya.
- b). Asuransi seumur hidup yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk seumur hidup pemegang polis yang mengharuskannya membayar premi setiap tahun.

¹⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; Prenada Media Group, 2009), h. 251.

- c). Asuransi dua manfaat yaitu kontrak asuransi jiwa yang masa berlakunya dibatasi misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau lebih atau mencapai usia tertentu misalnya 65 tahun sebelum peserta meninggal dunia.
- d). Asuransi unit investasi yaitu satu bentuk investasi kolektif yang ditawarkan melalui polis asuransi.

3). Asuransi Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

- a). Asuransi milik swasta nasional, yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta dan tetap dalam naungan pemerintah.
- b). Asuransi milik pemerintah yaitu perusahaan asuransi yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan dikelola oleh badan yang berwenang dalam pemerintahan.
- c). Asuransi milik perusahaan asing yaitu perusahaan asuransi yang kepemilikannya adalah dari negara lain (asing) yang beroperasi dalam negeri Indonesia.
- d). Asuransi milik campuran yaitu perusahaan asuransi yang saham dan kepemilikannya milik dari beberapa pihak, baik swasta maupun pemerintah.

4). Asuransi Ditinjau dari Pelaksanaannya

- a). Asuransi sukarela yaitu asuransi yang dilakukan dengan sukarela dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang akan

kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan.

- b). Asuransi wajib yaitu asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

5). Asuransi Ditinjau dari Kegiatan Penunjang Usaha Asuransi

- a). Pialang asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
- b). Pialang reasuransi yaitu usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penetapan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
- c). Penilai kerugian asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang diasuransikan.
- d). Konsultan aktuarial yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuarial.
- e). Agen asuransi yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

e. Risiko Asuransi Syariah

Dalam praktiknya risiko-risiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:¹¹

- 1). Risiko murni yang berarti bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan sesuatu peluang keuntungan.
- 2). Risiko investasi yaitu risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan peluang mengalami kerugian financial atau peluang memperoleh keuntungan.
- 3). Risiko individu dibagi menjadi dua macam:
 - a). Risiko pribadi adalah risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan akibat suatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau mati.
 - b). Risiko harta adalah risiko kehilangan harta apakah dicuri, hilang rusak yang menyebabkan kerugian keuangan.
- 4). Risiko tertanggung gugat yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.

f. Akad Asuransi Syariah

Berdasarkan ketentuan umum dalam asuransi syariah, peserta asuransi yang ikut dalam program perasuransian akan diberikan akad, dimana di dalam akad tersebut tentulah harus sesuai dengan syariah, yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), riba,

¹¹ *Ibid.* h. 256-257.

zhulm (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah:¹²

1). Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah akad untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*mudhorib*), sedangkan nasabah berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan beserta bagi hasilnya (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah).

2). Akad *Tabarru*

Akad *tabarru* adalah sama bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Di dalam akad *tabarru* adalah akad hibah dan akad *tabarru* tidak bisa menjadi akad *tijarah*. Dalam akad *tabarru*, peserta memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lainnya yang sedang terkena musibah. Sedangkan pada perusahaan bertindak sebagai pengelolaan dana hibah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah).

Akad *tabarru* adalah suatu akad hibah yang dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru* untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat clan atau

¹² Tazawun: *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No. 1 2018. h. 18.

bukan untuk tujuan komersial (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru* pada Asuransi Syariah menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam akad *tabarru* sebagai berikut:

- a) Dalam akad *tabarru* (hibah) maka nasabah memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau nasabah lain yang terkena musibah.
- b) Nasabah secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru*, dan secara kolektif selaku penanggung.
- c) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, berdasarkan atas akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

2. Kompensasi Asuransi

a. Asas-Asas Dalam Asuransi

Ada beberapa asas yang dikenal dalam asuransi, yaitu asas kesepakatan, asas keseimbangan (*indemnitas*), asas kepentingan yang dapat dipertanggung jawabkan (*insurable interest*), asas subrogasi dan asas itikad baik (*utmost good faith*).¹³

¹³ Emmy M. Suparman, *Asas-Asas Dalam Asuransi*, (Yogyakarta: Liberty, 1993). h. 23.

1). Asas Kesepakatan

Berdasarkan pada Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat sah suatu perjanjian, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan diriya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikataan.
- c) suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal.

Asas kesepakatan adalah syarat sah didalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak. Orang yang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *contradiction interminis*. Jika terdapat paksaan telah menunjukan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Kesepakatan memberikan pilihan kepada para pihak untuk setuju atau tidak setuju mengikatkan dirinya pada perjanjian dengan akibat hukumnya.

Pasal 1320 ayat 1 menentukan bahwa perjanjian atau kontrak yang tidak sah jika dibuat tanpa adanya kesepakatan (consensus) dari para pihak yang membuatnya. Selain paksaan cacat nya suatu kesepakatan didalam asuransi dapat terjadi karena kekeliruan, dan kesalahan.

2). Asas Keseimbangan (*Indemnitas*)

Asas *indemnitas* terdapat dalam asuransi kerugian yang intinya mengatakan bahwa tertanggung akan mendapatkan ganti

kerugian sebanding dengan pertanggungan yang ditutupinya.

Prinsip *indemnitas* dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

a). Dari tujuan pertanggungan itu sendiri

Pada dasarnya tujuan pertanggungan adalah bentuk menggantikan kerugian dari objek pertanggungan yang mengalami kerugian. Untuk itu harus dapat ketentuan Pasal 250 KUHD tentang syarat harus adanya kepentingan dari tertanggung terhadap objek yang mengalami kerugian, dan Pasal 268 KUHD yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus ada pada saat kepentingan untuk dapat dipertanggungkan, yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

b). Dari aspek pelaksanaan perjanjian peranggungan

Bahwa pelaksanaan perjanjian pertanggungan tidak boleh menempatkan tertanggung dalam keadaan yang lebih diuntungkan. Hal ini diatur di dalam Pasal 253 KUHD yang menentukan bahwa:

- (1). pertanggungan tidak boleh melebihi harga atau kepentingan yang sesungguhnya.
- (2). Apabila kepentingan tidak dipertanggungkan seluruhnya, maka dalam hal terjadi kerugian, penanggung hanya terkait pada keseimbangan dengan bagian yang dipertanggungkan saja.

2). Asas Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Sejalan dengan keinginan manusia untuk mendapatkan rasa aman dalam hidupnya maka keinginan orang untuk mengasuransikan harta bendanya semakin meningkat. Akan tetapi hanya kepentingan yang memenuhi ketentuan Pasal 268 KUHD saja yang dapat diasuransikan. Ketentuan dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa kepentingan itu dapat dinilai dengan uang tetapi terancam oleh suatu bahaya dan oleh suatu undang-undang tidak dikecualikan. Berdasarkan syarat itu maka kepentingan yang dapat diasuransikan adalah sebagai berikut:

- a). Kepentingan berdasarkan kedudukan sebagai pemilik, misalnya pemilik mobil mengasuransikan mobilnya.
- b). Kepentingan berdasarkan kedudukan sebagai penagih, misalnya asuransi kredit dalam kegiatan perbankan.
- c). Kepentingan berdasarkan suatu perjanjian, misalnya bank menyuruh nasabahnya untuk mengasuransikan rumahnya yang dijadikan agunan kredit.
- d). Kepentingan yang timbul atas dasar pertanggungjawaban menurut hukum, misalnya seorang pekerja diwajibkan oleh hukum untuk mengikuti asuransi tenaga kerja.

Selain penggolongan di atas, ada pula kepentingan lain yang dapat diasuransikan, yaitu:

- a). Adanya kepentingan pada seseorang apabila sebagai akibat dari peristiwa atau hak subyektifnya mengalami pengurangan nilai, misalnya rumah seseorang dapat terancam kebakaran sehingga pemilik rumah merasa berkepentingan untuk mengasuransikan rumahnya dengan asuransi kebakaran.
- b). Adanya kepentingan pada seseorang akibat dari peristiwa tak tentu orang tersebut tidak akan menerima suatu keuntungan atau tambahan kekayaan yang diharapkan, misalnya asuransi atas suatu kesalahan, terjadinya suatu kerugian.
- c). Adanya suatu kepentingan pada seseorang jika ada kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu kesalahan, misalnya asuransi atas suatu kesalahan, misalnya asuransi atas kecelakaan lalu lintas jalan.

3). Asas Subrogasi

Keberadaan asas subrogasi ini diatur dalam Pasal 284 KUHD yang isinya mengatakan bahwa penanggung yang sudah membayar kerugian barang yang diasuransikan mendapatkan semua hak dari tertanggung mengenai hal kerugian tersebut, yang dapat dimiliki terhadap pihak ketiga dan tertanggung bertanggungjawab kepada setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga.

Untuk menerapkan asas subrogasi harus diperhatikan dua hal, yaitu:

- a). Tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga.
- b). Hak-hak tersebut timbul karena adanya kerugian yang dialami tertanggung. Hak subrogasi baru dapat diterima penanggung setelah ia membayar semua ganti rugi yang menjadi kewajiban tertanggung.

4). Asas Itkad Baik (*Utmost Good Faith*)

Dalam perjanjian pertanggungan, di samping asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata masih dikenal prinsip itikad baik yang khusus, yaitu yang diatur pada Pasal 251 KUHD yang sering disebut sebagai prinsip itikad baik yang sempurna. Menurut asas ini, tertanggung harus mengatakan yang sebenar-benarnya kepada pihak asuransi semua informasi yang berkaitan dengan objek pertanggungan, karena dalam hal ini keadaan sesungguhnya dari objek pertanggungan diperlukan untuk menentukan premi atau kompensasi sesuai dengan resiko yang ditanggung oleh pihak penanggung, sehingga pada waktu penutup asuransi keterangan yang diberikan bukanlah keterangan yang sebenarnya, maka pihak asuransi juga akan keliru menetapkan premi atau kompensasi yang seharusnya dibayar. Jadi dalam hal ini asas itikad baik di dalam Pasal 251 KUHD adalah soal kewajiban yang harus dipenuhi tertanggung sebelum perjanjian-perjanjian pertanggungan itu ditutup.

b. Asuransi Kendaraan Bermotor

Untuk asuransi kendaraan bermotor, Dewan Asuransi Indonesia telah mengeluarkan kondisi standar asuransi kendaraan bermotor yang berlaku diseluruh Indonesia dan mengikat semua perusahaan asuransi anggota Dewan Asuransi Indonesia.

Risiko kecelakaan yang mungkin menimpa kendaraan bermotor berasal dari luar maupun dalam. Berasal dari luar misalnya ditabrak oleh kendaraan lai, dirusak atau dibakar oleh orang lain, karena banjir, topan badai dan sebagainya. Bersemuber dari dalam karena kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan pengemudi, misalnya menabrak kendaraan lain, menabrak orang, menabrak rumah penduduk, jatuh kejurang, terbakar dan lain-lain.

Risiko-risiko tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian *financial* tetapi juga tanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan. Menurut ketentuan KUHP bahwa pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan karena kendaraannya kesalahan/kelalaian atau kesalahan/kelalaian sopir yang mengemudi kendaraan tersebut.

c. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia sebagai berikut:¹⁴

1) Jaminan

¹⁴ Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. h. 1.

d. Objek Asuransi Kendaraan Bermotor

Pada asuransi kendaraan bermotor yang menjadi objek asuransi adalah kendaraan bermotor yang diasuransikan, yang tergolong dalam benda berwujud dan bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pada benda asuransi melekat pula hak subjektif yang merupakan hak dalam bentuk tidak berwujud, karena benda asuransi dapat rusak, hilang, atau berkurang nilainya, hak subjektif ini disebut kepentingan. Dalam asuransi hak subjektif ini dapat menjadi objek asuransi, objek asuransi ini disebut pokok asuransi antara lain:¹⁵

1). Benda Asuransi

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi, yang berupa harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Contohnya gedung, rumah, kapal, kendaraan bermotor.

2). Saat Kepentingan Harus Ada

Apabila orang atau badan hukum melakukan perjanjian asuransi berarti memiliki kepentingan, baik bagi dirinya ataupun bagi pihak ketiga.

3). Jumlah yang Diasuransikan

Jumlah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan jumlah ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh penanggung dalam suatu asuransi kerugian.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 87-99.

4). Nilai Benda Asuransi

Nilai benda asuransi dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu tergantung pada sifat dan keadaan benda tersebut. Nilai benda pada waktu diadakan asuransi berbeda dengan nilai benda pada waktu terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.

e. Kerugian dan Ganti Kerugian

1). Kerugian

Kerugian yang terjadi dalam konteks perasuransian biasanya dinyatakan dalam bentuk kerugian ekonomi dan besarnya dinilai dalam satuan mata uang, meskipun dampak kerugian yang ditimbulkan oleh terjadinya risiko bisa menimpa harta benda dan jiwa manusia, namun hakim pengadilan biasanya menjatuhkan keputusannya ke dalam kerugian ekonomi dan menyatakan besarnya satuan mata uang.¹⁶

Jika kendaraan bermotor yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan tersebut lebih besar dari pada harga asuransi, maka penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap bagian yang tidak diasuransikan. Kerugian ini disebut kerugian sebagian (*partial loss*) dan asuransi ini disebut asuransi dibawah harga (*under insurance*).

¹⁶ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta 2013), h. 63.

Selain itu, ada pula yang disebut kerugian total (*total loss*). Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut.

Menyimpang dari Pasal 277 Ayat 1 KUHD, dalam hal terjadinya kerugian dan kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan dengan polis ini, yang kendaraan bermotor tersebut sudah ditanggung oleh 1 (satu) atau lebih asuransi lain dan jumlah segala asuransi itu lebih dari harga kendaraan bermotor yang dimaksudkan itu, maka jumlah yang telah diasuransikan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala asuransi dengan harga yang diasuransikan. Akan tetapi, premi tidak dikurangi atau dikembalikan. Asuransi ini disebut asuransi rangkap. Ketentuan ini tetap dijalankan walaupun segala asuransi yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih dahulu dari pada tanggal polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan penanggung, tertanggung wajib memberitahukan secara

tertulis segala asuransi lain yang sedang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Tertanggung yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari jaminan polis ini, yang dengan sengaja memberi laporan tidak benar dengan:

- a). Memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- b). Menyembunyikan barang-barang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang-barang yang musnah;
- c). Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan;
- d). Melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang sedianya dijamin polis ini.

2). Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti persaingan yang dilakukannya. Dalam ilmu hukum, pengertian ganti rugi dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu:¹⁷

- a). Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung

¹⁷ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo 2004), h. 32.

dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian material sama sekali.

- b). Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.
- c). Ganti rugi actual (*actual damages*) yaitu kerugian yang benar-benar diderita secara actual dan dapat dihitung dengan mudah sampai kenilai rupiah.
- d). Ganti rugi campuran (*remedy medding*) yaitu suatu variasi dari berbagai taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi atau menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

B. Tinjauan Pustaka

1. Berdasarkan hasil penelitian skripsi oleh Gunawan (2013) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Terhadap Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang Dibebankan Fidusia Dihubungkan dengan Peraturan Asuransi dan Undang-Undang Jaminan Fidusia”.¹⁸ Menunjukkan bahwa Perusahaan pembiayaan dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan dalam hal objek

¹⁸Gunawan, “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Terhadap Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi atas Kehilangan Kendaraan Bermotor yang Dibebankan Fidusia Dihubungkan dengan Peraturan Asuransi dan Undang-Undang jaminan Fidusia”. Diperoleh tanggal 6 Oktober 2019.

jaminan yang hilang/musnah. Didukung dengan Pasal 34 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, debitor tetap bertanggung jawab atas hutangnya kepada kreditor karena hapusnya perjanjian jaminan fidusia tidak menghapus perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan konsumen (utang piutang) dan apabila timbul perselisihan antara penanggung dan tertanggung antara lain: (a) Mediasi secara musyawarah atau melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia; (b) Arbitrase; (c) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan/atau (d) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan gugatan wanprestasi dengan ganti rugi.

2. Berdasarkan hasil penelitian skripsi oleh Tia Destiana (2018) dengan judul “Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. EPRS Mitra Argo Usaha”.¹⁹ Hasil penelitian ini adalah nasabah harus mengetahui hak dan kewajiban dalam asuransi ini, yaitu kewajiban membayar premi dan mendapatkan hak dari klaim asuransi. Premi asuransi hanya dibayarkan satu kali pembayaran yakni pada saat masa pembiayaan belum berjalan. Kemudian untuk klaim asuransi kendaraan bermotor, lembaga asuransi mengganti sisa pokok dari jumlah pembiayaannya sampai pada bulan ditutupnya, tidak termasuk keuntungan atau margin yang telah disepakati pada saat akad.
3. Berdasarkan hasil penelitian skripsi oleh Mega Listra (2015) dengan judul “Analisis Implementasi Asuransi Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor

¹⁹ Tia Destiana, “Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. EPRS Mitra Argo Usaha”. (Skripsi Program Sarjana Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018). h. 8.

Cabang Syariah Malang”.²⁰ Hasil penelitian ini adalah dalam pembiayaan KPR BTN Syariah menetapkan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Pada asuransi KPR ini, nasabah harus mengetahui hak dan kewajiban dalam asuransi ini, yaitu membayar kewajiban premi dan mendapatkan hak dari klaim asuransi.

Tabel 1.1

Rangkuman Penelitian

No .	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Gunawan (2013) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Terhadap Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi atas Hilangnya Kendaraan Bermotor yang Dibebankan Fidusia Dihubungkan dengan Peraturan Asuransi dan Undang-Undang Jaminan Fidusia”.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan Dalam peristiwa tersebut, serta upaya hukum tertanggung terhadap penolakan klaim dari pihak asuransi.	Deskriptif	Didukung dengan Pasal 34 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, debitor tetap bertanggung jawab atas hutangnya kepada kreditor karena hapusnya perjanjian jaminan fidusia tidak menghapus perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan konsumen (utang piutang) dan apabila timbul perselisihan antara penanggung dan tertanggung antara lain: (a) Mediasi secara musyawarah atau melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia; (b) Arbitrase; (c) Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa

²⁰ Mega Listra, “Analisis Implementasi asuransi Jiwa Dan Asuransi Kebakaran Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang”. (Skripsi Program Sarjana Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015), h. 11.

				Konsumen: dan/atau (d) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan gugatan wanprestasi dengan ganti rugi.
2.	Tia Destiana (2018) dengan judul “Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. EPRS Mitra Argo Usaha”.	Fokus penelitian ini kepada penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor.	Kualitatif/ Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembiayaan kendaraan bermotor PT. BPRS Mitra Argo Usaha menerapkan asuransi kerugian sebagai pengalihan risikonya dimana jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor pada PT. BPRS Mitra Argo Usaha menggunakan <i>Total Loss Only</i> (TLO) yang menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan jarena hilang atas pencurian.
3.	Mega Listra (2015) dengan judul “Analisis Implementasi Asuransi Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang”.	Penelitian ini berfokus ada bagaimana implementa si asuransi dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).	Kualitatif/ Deskriptif.	dalam pembiayaan KPR BTN Syariah menetapkan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Pada asuransi KPR ini, nasabah harus mengetahui hak dan kewajiban dalam asuransi ini, yaitu membayar kewajiban premi dan mendapatkan hak dari klaim asuransi.

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Indikator	Persamaan	Perbedaan
1	Fokus Penelitian	Sistem Pembiayaan	Penerapan Asuransi
2	Metode/Analisis Data	Deskriptif Kualitatif/Komperatif	----

Dilihat dari table diatas, *gap research* dari penelitian ini adalah tentang fokus penelitian yang lebih mengacu pada penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Bina Dana Arta, untuk metode analisis data menggunakan kompratif, karena dalam penelitian ini peneliti mencoba membahas secara lebih dalam tentang gambaran penerapan asuransi kerugian dalam pembiayaan kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Al Arief, M. Nur Rianto, *Pemasaran Strategi Pada Asuransi Syariah*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Ali, Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Ali, Zanuiddin, *Hukum Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Henyal Muhammad, Huda Nurul, *Lembaga Keuangan Islam: Tujuan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Ismanto, Kuat, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syar'iah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- M. Suparman, Emmy, *Asas-Asas Dalam Asuransi*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Nitisusastro, Mulyadi, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT Intermasa, 1979.
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Salim, Abbas, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Jurnal dan Skripsi:

Gunawan, “*Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Terhadap Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi atas Kehilangan Kendaraan Bermotor yang Dibebankan Fidusia Dihubungkan dengan Peraturan Asuransi dan Undang-Undang jaminan Fidusia*”. Diperoleh tanggal 6 Oktober 2019.

Tia Destiana, “*Analisis Penerapan Asuransi Kerugian Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. EPRS Mitra Argo Usaha*”. Skripsi Program Sarjana Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

Kompensasi ”, (On-line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/kompensasi_finansial (6 September 2019).

Hukum Positif”, (On-line), tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Positif (6 September 2019).

Tazawun: *Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 1*, 2018.

Pengaturan Asuransi”, (On-Line), tersedia di: [https:// belapendidikan.com/ pengaturan-asuransi](https://belapendidikan.com/pengaturan-asuransi) (14 Oktober 2019).

Mega Listra, “*Analisis Implementasi asuransi Jiwa Dan Asuransi Kebakaran Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang*”. Skripsi Program Sarjana Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2015.

Ade Hari Siswanto, “Penyelesaian Klaim Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)”. *Lex Jurnalica*, Vol. 2 No. 3 Agustus 2009.

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001.